

Islam di Papua: Tiga Pilar Utama - Jejak Tidore (Abad 17), Pola Migrasi Nusantara, dan Dinamika Kerukunan Masa Kini

Islam in Papua: Three Main Pillars - Traces of Tidore (17th Century), Migration Patterns in the Archipelago, and the Dynamics of Contemporary Harmony

Mirza Ali Kharisudin¹, Rizky Nur Rohman², Muh Ridwan Wahyu Pratama³

^{1,2,3}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; mirza678ali@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/10/04; Revised: 2025/11/20; Accepted: 2025/12/13

Abstract

Since the 17th century, Tidore has served as a center of Islamic power, influencing the Papuan region through trade, political relations, and the appointment of local rulers, resulting in the development of Islamization along the Papuan coast. Migration flows from the colonial era to the modern Transmigration program, along with economic mobility and urbanization, have shaped Papua's ethnic diversity but have also created unequal access to economic, land, and political rights between Indigenous Papuans (OAP) and migrants. The purpose of this study is to highlight the link between the historical role of the Tidore Sultanate, the dynamics of migration in the archipelago, and the challenges of contemporary harmony in Papua. This research method uses a qualitative approach with a library approach through analysis of journals, books, and historical documents to understand the relationship between the history of power, migration, and harmony. The results show that various social frictions in Papua are more triggered by a sense of structural injustice than by differences in identity itself. However, local values such as one hearth, three stones, as well as the role of traditional leaders and religious institutions such as the FKUB (FKUB) contribute significantly to maintaining harmony and acting as mediators when potential conflicts arise. In conclusion, Papuan social integration requires affirmative policies for indigenous Papuans, equal access to resources, and strengthening local wisdom as a foundation for harmony.

Keywords

Harmony in Papua, Nusantara Migration, Tidore Sultanate.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Peran historis Kesultanan Tidore di Maluku sangat sentral sebagai pusat kekuatan Islam dan pengendali strategis jalur perdagangan rempah-rempah yang penting secara global pada abad ke-17. Pengaruh politik Kesultanan Tidore meluas jauh hingga ke kawasan Papua Barat, meliputi Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana, melalui implementasi sistem 'uku' atau daerah taklukan. Perluasan kekuasaan ini juga berfungsi sebagai mekanisme utama islamisasi di wilayah timur Nusantara, yang disebarluaskan melalui jaringan perdagangan, interaksi sosial-budaya, dan pengangkatan penguasa lokal. Kesultanan ini menjadi

simpul geopolitik dan budaya yang menghubungkan Maluku dengan Papua (Handoko and Mansyur 2018).

Meskipun menghadapi tantangan dari kekuatan kolonial Eropa, terutama Belanda, Tidore menunjukkan semangat perjuangan yang gigih. Hal ini mencapai puncaknya melalui perlawanan heroik yang dipimpin oleh Sultan Nuku pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Upaya Sultan Nuku untuk merebut kembali kedaulatan dan mempertahankan wilayah pengaruh Tidore, termasuk di Papua, menandai periode keemasan perlawanan Tidore terhadap dominasi kolonial. Meskipun kontrol Belanda semakin kuat pada abad ke-19, warisan pengaruh Tidore, khususnya dalam aspek keagamaan dan budaya, tetap kokoh di wilayah Papua hingga masa kemerdekaan Indonesia (Pamungkas 2019).

Konteks sejarah Tidore bersinggungan erat dengan dinamika migrasi di Nusantara, yang memiliki akar panjang sejak pergerakan awal Proto-Melayu dan Deutro-Melayu. Mobilitas penduduk ini semakin terstruktur dan masif pada masa kolonial melalui kebijakan Kolonisasi Belanda, yang bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui program Transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan tujuan ekonomi (Widodo and Supriatin 2023). Lampung merupakan salah satu wilayah pionir yang menjadi studi kasus utama dalam tiga fase besar perpindahan penduduk ini.

Di era modern, pola migrasi internal seperti urbanisasi semakin meningkat dan didorong oleh faktor-faktor sosio-ekonomi yang kuat. Harapan untuk meningkatkan taraf hidup, mencari pekerjaan, dan mengakses fasilitas yang lebih baik menjadi pendorong utama perpindahan penduduk ke daerah tujuan, selaras dengan teori migrasi yang mempertimbangkan faktor pendorong dan penarik (Qomariya, Soetarto, and Nur Inna 2021). Selain migrasi internal, globalisasi juga memicu fenomena migrasi internasional dan diaspora, di mana para migran membawa serta ikatan budaya dan agama dari daerah asal ke destinasi baru (Maulidia 2022).

Warisan sejarah dan dinamika migrasi yang kompleks ini pada akhirnya menciptakan tantangan kerukunan dan integrasi sosial di Papua saat ini, sebuah wilayah yang sangat majemuk dengan ratusan suku asli. Perubahan struktural akibat kedatangan pendatang dari berbagai etnis telah memunculkan dinamika relasi sosial yang tidak selalu harmonis, terutama dalam aspek ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, lahan, dan politik antara Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat pendatang (Ali, Rais, and Halik 2025). Kondisi ini memerlukan kebijakan afirmatif untuk menjamin keadilan sosial bagi OAP.

Meskipun menghadapi tantangan, masyarakat Papua juga menunjukkan kekuatan dalam menjaga kohesi sosial melalui nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai seperti falsafah "satu tungku tiga batu" di Fakfak, yang menyimbolkan kerukunan lintas iman, menjadi bukti praktik toleransi yang sudah mengakar. Peran sentral tokoh adat dan lembaga keagamaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi sangat penting sebagai mediator dan penjaga nilai di tengah masyarakat yang beragam, memastikan bahwa kerukunan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi terwujud dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari (Pandaiya, Ngabalin, and Camerling 2021).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyoroti keterkaitan antara peran historis Kesultanan Tidore, dinamika migrasi Nusantara, dan tantangan kerukunan masa kini di Papua. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi penguat dan sumber rujukan dalam hubungan antara sejarah kekuasaan, migrasi, dan kerukunan serta memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai Islam di Papua: Tiga Pilar Utama - Jejak Tidore (Abad 17), Pola Migrasi Nusantara, dan Dinamika Kerukunan Masa Kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Pustaka. Penelitian ini meninjau literatur sebelumnya tentang judul jurnal tersebut dalam konteks penelitian kepustakaan, yang merupakan jenis penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan melakukan pencarian data tidak langsung. Oleh karena itu, kepustakaan penelitian bergantung pada karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang sudah maupun yang belum dipublikasikan, serta sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bukanlah data yang langsung diperoleh dari lapangan, melainkan data yang dikumpulkan melalui studi terhadap berbagai karya tertulis seperti jurnal, buku, artikel, tesis, disertasi, dan dokumen lainnya yang relevan. Hasil dari penelitian pustaka ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai Islam di Papua: Tiga Pilar Utama - Jejak Tidore (Abad 17), Pola Migrasi Nusantara, dan Dinamika Kerukunan Masa Kini. Metode ini digunakan untuk penelitian yang membutuhkan pemahaman teoritis dan konsep yang lebih luas sebelum melakukan penelitian lapangan atau eksperimen.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kesultanan Tidore (Abad ke-17 hingga Masa Kolonial)

Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam yang terpenting di kawasan Maluku, yang berperan sangat strategis pada abad ke-17 hingga masa kolonial. Kesultanan ini memiliki posisi yang unik dan kuat sebagai pusat kekuasaan yang pengaruhnya meluas tidak hanya di Maluku tetapi juga hingga wilayah Papua, termasuk Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Peran Tidore sangat menonjol dalam proses islamisasi di wilayah timur Nusantara, khususnya Papua, melalui pengaruh politik, perdagangan, serta hubungan sosial budaya yang dibangun antara pusat kekuasaan Tidore dengan penguasa lokal di daerah-daerah tersebut (Handoko and Mansyur 2018).

Selama abad ke-17, Kesultanan Tidore dikenal sebagai salah satu pusat yang menguasai jaringan perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan pala yang sangat diminati oleh pasar internasional. Posisi Tidore yang strategis memungkinkan kontrol terhadap jalur perdagangan laut penting di kawasan Maluku dan Papua. Kesultanan ini juga aktif dalam menjalin hubungan politik yang memperkuat kekuasaannya dengan memberikan pengaruh kepada raja-raja lokal di wilayah Papua dan sekitarnya melalui sistem "uku" atau daerah taklukan. Hal ini terlihat dari bagaimana pengangkatan raja-raja Islam di Raja Ampat dilakukan oleh Kesultanan Tidore, sebagai upaya memperluas kekuasaan politik sekaligus menyebarkan agama Islam yang menjadi ciri khas kerajaan tersebut (Handoko and Mansyur 2018).

Proses islamisasi di Papua dimulai dengan kedatangan pedagang Muslim dari Maluku dan wilayah Nusantara lainnya yang melakukan kontak dengan penduduk pesisir Papua. Kontak ini bukan hanya sebatas kegiatan ekonomi tetapi juga menjadi medium penyebaran nilai-nilai agama Islam dan budaya baru. Melalui perdagangan komoditas seperti hasil laut dan kayu, para pedagang tersebut turut memperkenalkan Islam yang kemudian diadopsi oleh pemimpin lokal. Bukti-bukti sejarah yang kuat terkait islamisasi tersebut dapat ditemukan di makam-makam kuno dan tradisi lisan yang masih bertahan di daerah pesisir seperti Fakfak dan Raja Ampat. Tradisi-tradisi ini menjadi cerminan bagaimana agama Islam diterima dan diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat lokal, sekaligus membuktikan keberadaan kesultanan Tidore sebagai pusat penyebaran agama dan budaya Islam (Syahid, Gerung, and Tumundo 2009).

Ketika masa kolonial bermula, Kesultanan Tidore menghadapi tantangan yang cukup besar dari berbagai kekuatan kolonial, terutama Belanda. Awalnya, Tidore sempat bekerjasama dengan Spanyol dalam menghadapi Portugis dan kolonialis Eropa lainnya, namun kemudian pada pertengahan abad ke-17, Kesultanan Tidore mulai menjalin hubungan dengan VOC Belanda. Perjanjian dengan Belanda ini membatasi kedaulatan penuh Tidore, namun masih memberikan pengakuan atas wilayah pengaruh Tidore termasuk Papua. Di masa ini, Belanda memanfaatkan monopolinya atas perdagangan rempah-rempah dan mulai mendirikan benteng-benteng pertahanan untuk mengatur dan memonopoli jalur perdagangan, termasuk yang berada di wilayah kekuasaan Tidore (Syahid, Gerung, and Tumundo 2009).

Salah satu tokoh paling sentral dalam periode ini adalah Sultan Nuku, yang memimpin perlawanan besar melawan VOC dan Belanda pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Sultan Nuku berhasil menggalang kekuatan dan dukungan dari wilayah Tidore, Ternate, serta wilayah di Papua dan sekitarnya untuk melawan dominasi kolonial. Ia bahkan dengan bantuan Inggris sempat merebut kembali beberapa wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan Belanda. Gerakan perlawanan Sultan Nuku menandai periode puncak kejayaan dan semangat perjuangan Kesultanan Tidore untuk mempertahankan kedaulatannya dan memperjuangkan hak-hak politiknya atas wilayah yang menjadi bagian kekuasaannya (Pamungkas 2019).

Namun, tekanan kolonial Belanda semakin meningkat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Belanda memperkuat kontrolnya melalui perjanjian-perjanjian politik dan ekonomi yang membatasi aktivitas Kesultanan Tidore, termasuk penghapusan ekspedisi hongi yang selama ini menjadi simbol kekuasaan Tidore dalam mengontrol wilayah perairan di sekitar Maluku dan Papua. Meskipun demikian, pengaruh Kesultanan Tidore tetap bertahan terutama di wilayah Raja Ampat dan pesisir Papua Barat hingga masa kemerdekaan Indonesia. Kesultanan ini tidak hanya dianggap sebagai pemerintahan tradisional, tetapi juga sebagai institusi penting yang mendorong penyebaran agama Islam dan integrasi sosial budaya di wilayah tersebut (Pamungkas 2019).

Secara keseluruhan, peran Kesultanan Tidore dalam sejarah Indonesia bagian timur sangat penting dan banyaknya segi. Tidore bukan hanya sekadar kerajaan lokal yang bertahan di masa kolonial, tetapi juga pusat geopolitik dan budaya yang menghubungkan Maluku dengan Papua. Perpaduan antara kekuatan politik, peran strategis dalam perdagangan rempah, dan pengaruh dalam islamisasi menjadikan Kesultanan Tidore sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses sejarah panjang integrasi wilayah timur Indonesia dan penyebaran Islam di Nusantara Timur.

Dinamika Migrasi Nusantara dari Masa Kolonial Hingga Masa Modern

Dinamika migrasi di Nusantara memiliki akar historis yang panjang, bahkan sebelum era kolonial. Secara geologis, jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu kelompok Proto-Melayu dan Deutro-Melayu, telah membentuk keberagaman suku bangsa saat ini, dengan rute yang umumnya melalui jalur barat (Yunan) dan dipengaruhi oleh kondisi geomorfologis berupa lembah sungai, pesisir pantai, dan dataran rendah, yang turut menentukan cara bertahan hidup dan kebudayaan yang dihasilkan (Nanda et al. 2025)

Jauh sebelum kedatangan kekuatan kolonial, Nusantara telah dikenal sebagai wilayah maritim yang menjadi pusat perdagangan. Aktivitas perdagangan ini memicu mobilitas orang-orang ke luar tempat tinggalnya untuk menjual hasil pertanian, yang menandai bentuk awal interaksi antarwilayah. Namun, konsep kemaritiman Nusantara ini mengalami "kehancuran" ketika dikuasai oleh VOC, yang pada akhirnya berimbas pada penguasaan wilayah, sebelum era kolonial secara resmi berakhir pada proklamasi kemerdekaan (Widyatantri 2025).

Memasuki abad ke-16, perairan Nusantara mulai dijelajahi oleh kapal-kapal dagang Eropa karena kekayaan rempah-rempah dan hasil alam lainnya. Kehadiran koloni asing ini ditandai dengan aktivitas komersial dan politik, yang jejaknya dapat ditelusuri melalui catatan sejarah dan bukti arkeologi. Keberadaan sumber rempah-rempah tersebut bukan hanya menjadi bukti jaringan perdagangan, tetapi juga bukti adanya komunitas asing yang menetap di wilayah Nusantara, menandai bentuk awal migrasi masuk (in-migration) pada masa kolonial (Harkantining 2014).

Pada awal abad ke-19, seiring menguatnya pengaruh kolonial, dinamika interaksi antar-etnis di wilayah-wilayah seperti Pesisir Timur Sumatra menjadi sorotan. Catatan perjalanan John Anderson (1823) menggambarkan kehidupan sosial dan dinamika antar-etnis di Batubara. Di wilayah ini, terjadi interaksi dan bahkan konflik antar-etnis karena perbedaan budaya, tradisi, dan kepentingan yang saling berhadapan, yang juga tercermin dalam pola perdagangan, di mana Masyarakat Melayu memposisikan diri lebih dominan secara budaya dan politik (Maulana, Siregar, and Nasution 2025).

Kebijakan migrasi internal yang paling masif dimulai sejak masa kolonial hingga masa modern. Penelitian di Lampung menunjukkan bahwa migrasi terjadi dalam tiga masa: Kolonial Belanda (Kolonisatie) untuk kepentingan perkebunan dan tenaga kerja, Pendudukan Jepang (Kokumenggakari) untuk membantu ekonomi perang, dan Pemerintahan RI (Transmigrasi) yang bertujuan untuk penyebaran penduduk, perbaikan ekonomi, dan mengurangi kepadatan Pulau Jawa. Lampung sendiri menjadi pionir dalam proyek perpindahan penduduk ini di ketiga masa pemerintahan tersebut (Widodo and Supriatin 2023).

Dampak dari kebijakan Transmigrasi (paska-kolonial/modern) salah satunya terlihat pada kebertahanan budaya di daerah tujuan. Di Kota Metro dan wilayah penyangganya (Lampung), berbagai aspek budaya Jawa masih dipertahankan dan lestari dalam komunitas transmigran, termasuk bahasa sehari-hari, ritual adat seperti selametan dan ruwatan, seni pertunjukan, hingga semangat gotong royong (sambatan). Kelestarian budaya ini diperkuat oleh dominasi komunitas Jawa dan partisipasi generasi muda (Wibowo et al. 2025).

Pada masa modern, dinamika migrasi internal dipicu oleh faktor-faktor sosio-ekonomi. Contohnya di Desa Talango, migrasi didorong oleh faktor ekonomi yang kuat, terutama harapan untuk mengubah standar hidup menjadi lebih baik dan adanya ketersediaan pekerjaan di tempat tujuan migrasi. Analisis migrasi ini sering menggunakan teori Everett S. Lee (1970), yang mempertimbangkan faktor positif (penarik), negatif (pendorong), dan netral dalam proses perpindahan penduduk (Qomariya, Soetarto, and Nur Inna 2021).

Secara keseluruhan, dinamika penduduk Indonesia selama periode 2015-2025 menunjukkan transformasi struktural yang signifikan, ditandai dengan munculnya bonus demografi dan peningkatan pesat dalam urbanisasi. Urbanisasi, yang merupakan salah satu bentuk migrasi internal modern, terus meningkat dan berimplikasi besar pada perencanaan pembangunan nasional, seperti kebutuhan akan infrastruktur dan lapangan pekerjaan (Danil and Rochayati 2025).

Akhirnya, pada masa modern, migrasi tidak lagi hanya bersifat internal tetapi juga global. Fenomena Imigrasi, Diaspora, dan Transnational Migration menjadi objek kajian sosiologi keimigrasian. Diaspora didefinisikan bukan hanya perpindahan, tetapi juga membawa serta rasa keterikatan atau kepemilikan terhadap nilai-nilai (seperti agama atau budaya) dari daerah asal. Fenomena ini juga diperkuat oleh globalisasi yang meningkatkan volume dan perluasan destinasi migrasi internasional (Maulidia 2022).

Tantangan kerukunan dan Integrasi Masa Kini

Papua merupakan wilayah dengan tingkat kemajemukan etnis dan budaya tertinggi di Indonesia, dengan lebih dari 250 suku asli yang tersebar di wilayah pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan. Keberagaman ini membentuk struktur sosial yang unik, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam membangun integrasi sosial dan menjaga keharmonisan antar kelompok. Keragaman tersebut tidak hanya bersifat etnis, tetapi juga agama, di mana masyarakat Papua hidup berdampingan dalam identitas Kristen (Protestan dan Katolik), Islam, serta kepercayaan local (Yanti et al. 2025).

Secara sosial-politik, tantangan integrasi di Papua tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang transmigrasi, pemekaran wilayah, dan kebijakan pembangunan yang sering kali belum sepenuhnya berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Kehadiran pendatang dari berbagai etnis seperti Bugis, Jawa, Toraja, dan lainnya telah mengubah struktur sosial dan ekonomi Papua secara signifikan. Perubahan ini memunculkan dinamika relasi yang tidak selalu harmonis, terutama dalam aspek penguasaan lahan, akses ekonomi, dan representasi politik (Ali, Rais, and Halik 2025).

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keragaman agama dan etnis yang sangat kuat. Mayoritas penduduknya beragama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, sementara umat Islam hadir sebagai kelompok minoritas yang cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini menciptakan ruang perjumpaan sosial yang intens antara kelompok agama dan etnis yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi lintas iman di Papua pada umumnya berlangsung secara terbuka dan saling menghormati. Penelitian tentang toleransi beragama di wilayah Papua menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memegang sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial, meskipun perbedaan keyakinan cukup tajam (Amalia and Nanuru 2018).

Keberadaan umat Islam di tengah dominasi masyarakat Kristen tidak hanya dapat dipahami sebagai dampak migrasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses sejarah sosial yang panjang. Umat Islam telah membangun relasi sosial melalui perdagangan, perkawinan, dan interaksi budaya yang menyatu dengan kehidupan masyarakat lokal. Di beberapa wilayah seperti Fakfak, nilai adat satu tungku tiga batu bahkan menjadi simbol kuat kehidupan lintas agama, di mana Islam, Katolik, dan Protestan hidup dalam satu ikatan kekerabatan yang harmonis (Pandaiya, Ngabalin, and Camerling 2021).

Perbedaan identitas etnis dan agama di Papua pada dasarnya merupakan kekayaan sosial, namun dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi sumber ketegangan, terutama ketika dikaitkan dengan perebutan sumber daya ekonomi, tanah, dan akses kekuasaan. Penelitian tentang dinamika interaksi sosial masyarakat Papua menunjukkan bahwa konflik tidak selalu muncul karena perbedaan itu sendiri, tetapi lebih sering dipicu oleh rasa ketidakadilan dan ketimpangan akses terhadap sumber daya strategis (Ali, Rais, and Halik 2025).

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah persoalan kesetaraan antara Orang Asli Papua (OAP) dan penduduk pendatang, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Ketimpangan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesempatan kerja masih menjadi persoalan struktural yang dirasakan oleh banyak OAP. Studi tentang keragaman etnis dan pendidikan multikultural di Papua menegaskan bahwa rendahnya akses pendidikan dan lemahnya perlindungan sosial bagi OAP memperbesar jurang sosial dengan masyarakat pendatang (Yanti et al. 2025). Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap rasa keterpinggiran yang kemudian memicu resistensi sosial. Oleh karena itu, tantangan integrasi di Papua tidak cukup diatasi melalui pendekatan keamanan semata, tetapi harus disertai kebijakan afirmatif yang menjamin keadilan sosial, penguatan kapasitas OAP, serta pengelolaan sumber daya yang adil dan transparan.

Pola pemukiman masyarakat di beberapa wilayah Papua, khususnya di kawasan perkotaan seperti Jayapura, menunjukkan kecenderungan terbentuknya pengelompokan hunian berdasarkan latar belakang etnis dan asal penduduk. Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) umumnya masih bertahan di kampung-kampung adat seperti Tobati dan Enggros, sementara kelompok pendatang cenderung menempati kawasan pemukiman baru yang berkembang mengikuti pusat-pusat ekonomi dan jaringan transportasi. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sejarah migrasi dan kebijakan penataan kota, tetapi juga oleh ikatan kekerabatan, rasa aman sosial, serta kedekatan dengan sumber penghidupan tradisional (Putra, Widyastomo, and Sudiro 2024). Pola seperti ini membentuk ruang sosial yang relatif homogen, baik dari sisi etnis maupun agama, sehingga interaksi lintas kelompok tidak selalu berlangsung secara intens dalam kehidupan sehari-hari.

Peran tokoh adat dan pemuka agama menjadi elemen penting dalam menjaga kerukunan masyarakat Papua yang beragam secara etnis dan religius. Studi tentang peran FKUB Kota Jayapura menunjukkan bahwa lembaga ini berfungsi sebagai ruang dialog dan koordinasi antarumat beragama, sekaligus sebagai mediator ketika muncul potensi gesekan di tingkat komunitas. Program pembinaan kerukunan, penyuluhan moderasi agama, serta forum komunikasi antar-gereja dan masjid menjadi instrumen yang digunakan FKUB untuk memperkuat hubungan antar kelompok. Pendekatan ini tidak hanya menekankan toleransi, tetapi juga mendorong kerja sama dalam kegiatan sosial, sehingga hubungan antaragama tidak berhenti pada ranah simbolik tetapi hadir dalam praktik keseharian masyarakat (Amirullah et al. 2022).

Selain lembaga keagamaan, lembaga adat dan tokoh adat memainkan peran sentral dalam menjaga kohesi sosial di berbagai wilayah Papua. Lembaga adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penengah konflik, dan pengatur relasi antar-kelompok melalui mekanisme adat seperti musyawarah, dudu tikar, dan penyelesaian sengketa berbasis kekerabatan. Nilai-nilai lokal yang dijaga oleh tokoh adat seperti rasa hormat, persaudaraan, dan keterikatan komunal menjadi modal sosial yang memperkuat kerukunan di tengah dinamika politik dan ekonomi yang sering kali memicu ketegangan. Peran tokoh adat ini terbukti efektif terutama dalam menjaga harmoni di wilayah kampung adat, di mana otoritas adat masih dihormati oleh masyarakat lintas agama (Suryawan 2022).

Nilai-nilai toleransi tradisional di Papua tumbuh dari kuatnya ikatan kekerabatan, semangat persaudaraan lintas iman, serta kebiasaan hidup bersama dalam keberagaman. Masyarakat di sejumlah wilayah Papua menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi terbangunnya relasi sosial yang harmonis. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, hubungan antaranggota keluarga dan antarwarga tetap terjalin erat meskipun berbeda keyakinan. Sikap saling menghormati, solidaritas sosial, dan kesadaran kolektif sebagai satu komunitas menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan umat beragama (Renna 2021).

SIMPULAN

Kesultanan Tidore memiliki peran historis yang sangat penting dalam membentuk identitas Islam dan struktur sosial di Papua. Sejak abad ke-17, Tidore tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik dan perdagangan rempah di Maluku, tetapi juga aktor kunci dalam proses islamisasi di wilayah timur Nusantara. Melalui jaringan perdagangan, hubungan politik, serta pengangkatan penguasa lokal, pengaruh Tidore menyebar hingga Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana. Perlawanan Sultan Nuku pada akhir abad ke-18 menegaskan upaya mempertahankan kedaulatan serta wilayah pengaruh Tidore, dan meninggalkan warisan budaya serta keagamaan yang masih terlihat di pesisir Papua hingga masa modern.

Dinamika migrasi Nusantara memiliki akar yang panjang dan terus membentuk komposisi masyarakat Indonesia, termasuk Papua. Mobilitas penduduk, yang dimulai sejak era Proto-Melayu dan Deutro-Melayu, semakin terstruktur pada masa kolonial melalui kebijakan Kolonisatie dan kemudian diikuti oleh program Transmigrasi pasca-kemerdekaan. Pada masa modern, migrasi didorong oleh faktor ekonomi, urbanisasi, dan globalisasi. Gelombang migrasi ini berkontribusi pada meningkatnya keberagaman etnis dan budaya di Papua, namun sekaligus memunculkan tantangan terkait distribusi sumber daya dan relasi sosial.

REFERENSI

- Ali, Muhammad, Lukman Rais, and Wahyudin Halik. 2025. "Antara Integrasi Dan Resistensi : Dinamika Pola Interaksi Sosial Masyarakat Asli Papua." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 14 (2): 290–303.
- Amalia, Ainna, and ricardo freedom Nanuru. 2018. "Toleransi Beragama Masyarakat Bali, Papua, Maluku." *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan ,Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam.* 10 (1): 150–61. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.
- Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, and Athoillah Islamy. 2022. "Pancasila Dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Jayapura." *Jurnal Pancasila Dan Kerukunan Hidup Umat Beragama* 8 (1): 197–215.
- Danil, and Nurin Rochayati. 2025. "Analisis Dinamika Penduduk Dan Perubahan Komposisi Demografi Di Indonesia: Implikasi Bagi Perencanaan Pembangunan." *Education, Social Sciences, and Linguistic: Conference Series* 1 (2): 106–11. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ecs>.
- Handoko, Wuri, and Syahruddin Mansyur. 2018. "Kesultanan Tidore : Bukti Arkeologi Sebagai Pusat Kekuasan Islam Dan Pengaruhnya Di Wilayah Periferi." *Jurnal Berkala Arkeologi* 38 (1): 17–38.
- Harkantiningsih, Naniek. 2014. "Pengaruh Kolonial Di Nusantara." *Majalah Arkeologi* 23 (4): 67–80.
- Maulana, Imran, Yusra Dewi Siregar, and Kasron Muhsin Nasution. 2025. "Analisis Sejarah Sosial Masyarakat Batubara Serta Dinamika Etnis Dalam ' Mission to The East Coast of Sumatra ' Oleh John Anderson (Abad Ke-19)." *Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial* 3 (November): 349–59.
- Maulidia, Hanifa. 2022. "Imigrasi, Diaspora, Dan Transnational Migration Dalam Kajian Sosiologi Keimigrasian Immigration, Diaspora, and Transnational Migration in Sociology of Immigration Studies." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 5 (1): 45–60. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.317>.
- Nanda, Shelia, Mely Wulandari, Khoirul Iqbal, Sani Safitri, and Rani Oktapiani. 2025. "Telaah Geomorfologis : Jalur Migrasi Nenek Moyang Bangsa Indonesia Proto Dan Deutro Melayu." *El-Jughrifiyah* 5 (2): 190. <https://doi.org/10.24014/jej.v5i2.36740>.
- Pamungkas, Cahyo. 2019. "Menelusuri Akar Konflik Dan Kebijakan Damai Di Tanah Papua." *Antropologi Indonesia* 40 (2): 1–24. <https://doi.org/10.7454/ai.v40i2.12217>.
- Pandaiya, Delvia, Marthinus Ngabalin, and Lindra Yolandra Camerling. 2021. "Pengaruh Budaya 'Satu Tungku Tiga Batu' Terhadap Sikap Toleransi Beragama Pada Masyarakat Werba Fakfak Papua." *Jurnal Misioner* 1 (1): 18–40. www.jurnal.sttkibaid.ac.id/.
- Putra, Awal Purnama, Deasy Widyastomo, and Sudiro Sudiro. 2024. "Perkembangan Pola Permukiman Tradisional Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus: Kampung Enggros Dan Kampung Tobati Di Kota Jayapura)." *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan* 3 (2): 01–11. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i2.481>.
- Qomariya, Fajrin Nurul, Hadi Soetarto, and Alfiyah Nur Inna. 2021. "Migrasi Dalam Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Talango." *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja* 16 (1): 79–96.
- Renna, Hendrik Ryan Puan. 2021. "Satu Tungku Tiga Batu, Toleransi Hidup Beragama Masyarakat Fak-Fak: Tinjauan Ensiklik Fratelli Tutti." *Jurnal Antropologi Papua* II (2): 75–86.
- Suryawan, INGURAH. 2022. "Membangun Kampung Adat Dan Juga Melawan Investasi : Artikulasi Adat Di Kabupaten Jayapura , Papua Developing Customary Villages and Ressisting Investment :".

- Articulation Indigenous People in Jayapura of Papua." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 48 (1): 31–46.
- Syahid, Achmad, Arthur Gerung, and Deyvi Tumundo. 2009. "Kampung Tidore Di Pulau Sangihe Dan Pulau Lembeh: Dinamika Antar Wilayah Dan Agama Pada Abad Ke-17 Dan 18 Achmad," 1–19.
- Wibowo, Arman Surya, Wasino, Edi Kurniawan, and Argitha Aricindy. 2025. "Kebertahanan Budaya Jawa Pada Masyarakat Transmigran Di Kota Metro Dan Wilayah Penyanggah : Studi Observasi Lapangan Dan Studi Pustaka The Survival of Javanese Culture in Transmigrant Communities in Metro City and the Buffer Zone : A Field Observation Stu." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2 (November): 8352–62.
- Widodo, Setio, and Endang Supriatin. 2023. "Menelurusi Arus Migrasi Di Lampung Dalam Tiga Masa." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 11 (2): 213. <https://doi.org/10.24127/hj.v1i2.7466>.
- Widyatantri, Tyas Dyah. 2025. "Perkembangan Maritim Nusantara Yang Menjadi Awal Dari Kegiatan Perdagangan Di Wilayah Banten." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2 (2): 326–34.
- Yanti, Hapsari Rahma, Anzilni uswatuin Hasanah, Dian Miagia Ilyas, Nadia Sampulawa, Dewi Nur Annisa, and Sulis Maryati. 2025. "Keragaman Etnis Di Papua: Pemetaan Kelompok Etnis Utama Dan Urgensi Pendidikan Multikultural Di Papua." *Jurnal Cendekia Pendidikan* 14 (1).
- Yahyani, W. A., Kurnianto, R., & Ariyanto, A. (2020). The role of integrated schools in improving Islamic education in Muslim minority areas of Cambodia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 4(2), 149–162. <https://doi.org/10.35723/ajie.v4i2.123>
- Yusuf, I. (2021). *Islam and Buddhist dialogue in Southeast Asia*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Yusuf, M. (2023). The relationship of Islam and the state in contemporary Islamic thought. *Dirasah: Journal of Islamic Studies*, 8(2), 55–71. <https://doi.org/10.59373/drs.v1i2.11>
- Warnk, H. (2009). Alternative education or teaching radicalism? New Islamic schools in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 28(4), 111–132. <https://doi.org/10.1177/186810340902800406>